

Pengaruh Ukuran Daerah, Opini Audit dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Audit Delay

DOI : <https://doi.org/10.33096/atestasi.v2i2.271>

Author : Dewi Sarifah Tullah¹ Erma Apriyanti² Fitri Rianti³

Email : dewisarifatullah@gmail.com¹ apriyantierma@yahoo.co.id²
fitririanti17@gmail.com³

Afiliasi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pandu Madania, Bogor^{1,2,3}

Corepondence author: *fitririanti17@gmail.com

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membahas pengaruh ukuran daerah, opini audit dan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap audit delay periode 2015 dan 2016. Populasi penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2015 dan 2016. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling atau dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2015 dan 2016 yang dalam laporan keuangannya mengungkapkan opini auditor yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam LKPD-nya mengungkapkan jumlah entitas akuntansi yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi Method of Successive interval/MSI, Uji Asumsi Klasik, analisis regresi Linear Berganda serta Uji Hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap audit delay sedangkan opini audit dan tingkat ketergantungan daerah berpengaruh terhadap audit delay.

Kata Kunci : Audit delay; Opini audit ; Tingkat ketergantungan daerah; Ukuran daerah

ABSTRACT : This study aims to examine and discuss the effect of regional size, audit opinion and the level of regional financial dependence on audit delays in the 2015 and 2016. The population of this study is all Regency / City Governments in Indonesia in 2015 and 2016. This study uses a purposive sampling technique or by criteria determined by the researcher. The criteria for selecting the sample in this study are the Regency / City Governments in Indonesia in 2015 and 2016 who in their financial statements express the auditor's opinion given by BPK to the Regency / City Government and Regency / City Government whose LKPD discloses the number of accounting entities owned by the regional government. Data analysis methods that will be used in this study include Method of Successive interval / MSI, Classic Assumption Test, Multiple Linear regression analysis and Hypothesis Test. The results of this study indicate that the size of the area does not affect the audit delay while the audit opinion and the level of regional dependence affect the audit delay.

Keyword : Audit delay; Audit opinion; Level of regional dependency; Area size

Pendahuluan

Pelaporan keuangan merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban dari proses pengelolaan keuangan entitas berupa pengelolaan sumberdaya, kewajiban, penghasilan perusahaan dan lainnya untuk dikomunikasikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Belkaoui, 2008). Tujuan pelaporan keuangan dalam entitas sektor publik adalah bentuk pertanggungjawaban (IPSASB, 2010). Oleh karena itu, Informasi yang berkualitas harus memiliki karakteristik kualitatif agar berguna bagi pemakainya dalam pengambilan keputusan dan untuk tujuan pertanggungjawaban. Karakteristik kualitatif informasi dari laporan keuangan adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Salah satu unsur penting agar informasi dalam pelaporan keuangan relevan yaitu apabila pelaporan keuangan disampaikan secara tepat waktu (SAP, 2010).

Di Indonesia, kepatuhan mengenai ketepatan waktu dalam menyampaikan Pelaporan keuangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jarak antara berakhirnya periode akuntansi sampai dengan diterbitkannya laporan hasil audit merupakan rentang waktu yang ditimbulkan dalam proses pemeriksaan akuntansi, hal ini juga dikatakan sebagai audit delay. Subekti dan Widyanti (2004) menyebutkan bahwa audit delay merupakan perbedaan antara tanggal laporan keuangan dan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. Hardini dan Sukirman (2016) mengemukakan hal yang sama yaitu audit delay merupakan rentang waktu antara berakhirnya periode akuntansi (31 Desember) sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan auditor.

Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan yang dibuat perusahaan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan auditan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor (Lestari & Saitri, 2017). Namun IHPS semester satu laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari tahun 2012-2016 walaupun mengalami penurunan namun masih ada beberapa pemerintah daerah yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. LKPD yang terlambat disampaikan ke BPK tahun 2012 yaitu 98 LKPD kemudian meningkat menjadi 109 LKPD di tahun 2013 Tahun 2014-2016 LKPD yang terlambat disampaikan menurun yaitu berturut-turut menjadi 98, 35 dan 9 LKPD (Praptika & Rasmini, 2016)..

Fenomena ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu penyajian laporan keuangan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Pentingnya publikasi laporan keuangan auditan sebagai informasi yang sangat bermanfaat menjadikan audit delay serta faktor yang mempengaruhinya merupakan objek penelitian yang penting untuk dipelajari (Lestari & Saitri, 2017). Selama ini penelitian mengenai audit delay lebih banyak

berfokus pada sektor swasta, sedangkan pada sektor publik dapat dibilang masih sangat minim. Beberapa peneliti tersebut antara lain adalah Dwyer dan Wilson (1989), McLelland dan Giroux (2000), Payne dan Jensen (2002) yang melakukan penelitian di Amerika. Cohen dan Leventis (2013) yang melakukan penelitian di Yunani. Muladi (2014) dan Fachrurizie (2014) yang melakukan penelitian di Indonesia.

Penelitian ini merujuk pada penelitian (Hardini & Sukirman, 2016) yang menganalisis Determinan Audit Delay Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian (Hardini & Sukirman, 2016) adalah pada penelitiannya menguji variable akuntabilitas kinerja, ukuran daerah dan opini auditor terhadap tingkat audit delay, sedangkan penelitian ini menggunakan variable tingkat ketergantungan daerah, ukuran daerah dan opini auditor terhadap tingkat audit delay Periode 2015-2016.

Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989). Pertama adalah masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari prinsipal dan agenberlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah bahwa principal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua adalah masalah pembagian resiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko. Dengan demikian, prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan preferensi resiko. Menurut Siregar, (2015) Teori keagenan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pemegang saham dan manajemen. Teori keagenan juga tidak hanya relevan dalam organisasi komersial. Hubungan yang dijelaskan dalam teori keagenan dapat terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan.

Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban pengelolaan; serta untuk memberi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional (Mardiasmo (2009).

Ukuran daerah merupakan suatu gambaran besar kecilnya suatu perusahaan atau daerah. Ukuran daerah dalam penelitian ini dilihat dari banyaknya entitas akuntansi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Semakin banyak entitas akuntansi yang dimiliki maka pemerintah daerah semakin mudah dalam menyusun laporan keuangannya. Ukuran daerah yang besar cenderung akan memiliki sistem manajemen informasi yang

lebih baik, sumber informasi dan staf akuntansi yang lebih banyak, sistem pengendalian internal yang kuat, dan adanya pengawasan yang lebih dari investor, regulator dan juga masyarakat. Daerah yang lebih besar juga cenderung memiliki investor yang banyak sehingga akan lebih diawasi secara kritis oleh regulator dan masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah, oleh karena hal tersebut daerah akan berusaha untuk menghindari keterlambatan penyampaian laporan keuangan (Dyer dan McHugh, 1975).

Jumlah entitas akuntansi dianggap dapat menggambarkan ukuran suatu daerah karena daerah yang besar cenderung memiliki masalah yang lebih kompleks yang disebabkan oleh banyaknya hal yang harus diatur sehingga membutuhkan lebih banyak entitas-entitas yang mewakili setiap daerah untuk membantu menangani masalah-masalah sesuai bidang kerja yang telah ditetapkan (Hardini dan Sukirman, 2016). Menurut (Hardini & Sukirman, 2016) pemerintah daerah hanya perlu melakukan konsolidasi laporan keuangan dari entitas-entitas akuntansi, dan tidak perlu mencatat satu persatu transaksi yang terjadi di dalam pemerintah daerah tersebut berkenaan dengan penggunaan anggaran.

H1 : Ukuran daerah berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay

Auditor merupakan pihak yang independen dalam pemeriksaan laporan keuangan (Mulyadi, 2002). Opini audit merupakan pernyataan standar dari kesimpulan yang dibuat oleh auditor yang didapatkan berdasarkan proses audit (Tiono dan Yulius, 2013), dan merupakan tahap akhir berupa kesimpulan akhir dari proses pemeriksaan (Hardini & Sukirman, 2016). Mulyadi (2002) menjelaskan beberapa jenis opini yang bisa dikeluarkan oleh auditor yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTPDPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini audit merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi audit delay. Apabila daerah mendapat opini WTP maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun dengan baik. Sebaliknya apabila daerah mendapat opini selain WTP maka proses pengauditan semakin panjang, hal ini dikarenakan masih adanya prosedur penelaahan lebih lanjut dan akan mengindikasikan semakin panjangnya waktu audit (Payne and Jansen, 2002). Penyusunan laporan keuangan yang baik dapat menjadi cerminan bahwa daerah tersebut telah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik.

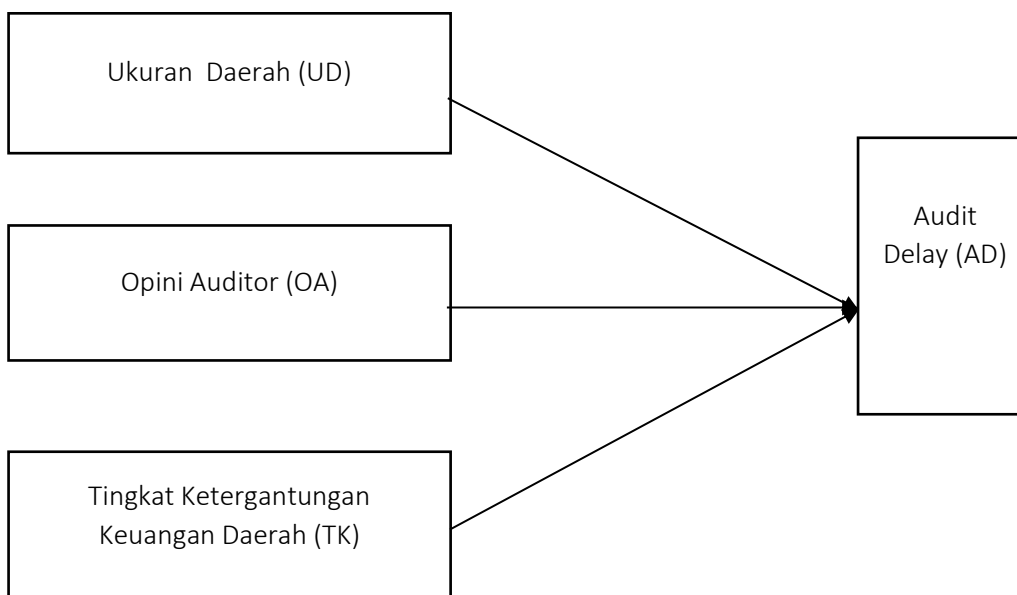
Daerah yang telah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik tentunya akan memiliki sistem penyusunan laporan keuangan yang baik sehingga waktu yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan akan lebih singkat. Semakin singkat daerah dalam menyusun laporan keuangannya maka akan semakin memperpendek audit delay yang terjadi. Semakin cepat laporan keuangan disampaikan kepada BPK untuk diperiksa maka akan semakin pendek pula audit delay yang terjadi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian McLelland dan Giroux (2000), Payne

dan Jensen (2002), dan Muladi (2014) yang menunjukkan bahwa opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) akan meningkatkan audit delay.

H2 : Opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay

Menurut Cohen dan Leventis (2013), pemerintah daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat termasuk peraturan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut dimotivasi adanya sanksi kepada pemerintah daerah berupa penundaan pemberian bantuan apabila pemerintah daerah terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada Pemerintah Pusat. Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dan audit delay akan berkurang. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya tingkat ketergantungan daerah dengan dana perimbangan yang diberikan pemerintah maka pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dalam melaporkan LKPD (Rachmawi, Rini, & Fitri, 2016).

H3 : Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay



Gambar 1. Model Penelitian

Metode Penelitian

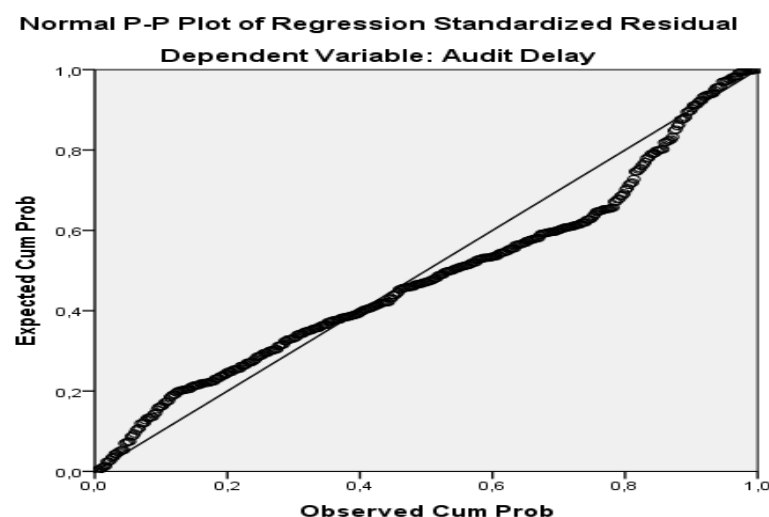
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini diambil dari daftar opini LKPD yang terlampir dalam IHPS II tahun 2015 dan 2016 yang diterbitkan oleh BPK, dan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015 dan 2016.

Prosedur yang dilakukan dalam proses pengumpulan data ini dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya, menggali data dari sumber sekunder untuk memperoleh data mengenai ukuran daerah, opini auditor dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2015 dan 2016. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling atau dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2015 dan 2016 yang dalam laporan keuangannya mengungkapkan opini auditor yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam LKPD-nya mengungkapkan jumlah entitas akuntansi yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi Method of Successive interval/MSI, Uji Asumsi Klasik, analisis regresi Linear Berganda serta Uji Hipotesis (Sugiyono, 2010).

Hasil dan Pembahasan

Dari uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa data menyebar mengikuti garis diagonalnya hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Hasil dari uji normalitas tersebut dapat dilihat dalam gambar 2.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas (P-Plot)

Hasil pengolahan data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Dw adalah 1,525. Nilai DL adalah 1.82811 dan nilai DU adalah 1.84771, hal ini menunjukkan bahwa nilai Dw dari hasil penelitian ini lebih kecil dari nilai DL dan DU sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini terdapat autokorelasi.

Untuk mengatasi gangguan autokorelasi, penelitian ini menambahkan lag dari variabel audit delay menjadi salah satu variabel bebasnya dan menguji ulang data

setelah ditambah dengan lag-variabel. Hasil pengujian ulang ini diperoleh nilai Dw yang lebih besar dari nilai DL maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini sudah tidak terdapat gangguan autokorelasi. Hasil pengujian ulang tersebut dapat dilihat dalam tabel 1 :

Tabel 1. Hasil Uji Autokorelasi Setelah Ditambah Variabel Lag-AD

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,349 ^a	,122	,113	20,43686	2,121

Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF dari semua variabel bebas bernilai kurang dari 10, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gangguan multikolinearitas. Peneliti menggunakan uji glejser dan melihat *scatterplot* (nilai prediksi variabel dependen ZPRED dengan residualnya SRESID) untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dalam data penelitian ini. Jika nilai signifikansi pada uji glejser untuk variabel independen diatas alpha (α) 5% atau 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun jika nilai signifikansi variabel independen di bawah 5% maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji glejser menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel ukuran daerah yaitu 0, 217 lebih besar dari 0,05 artinya variabel ukuran daerah tidak terjadi heteroskedastisitas, kemudian variabel opini audit memiliki nilai signifikansi 0,061 diatas 0,05 artinya variabel ini juga tidak terdapat masalah heteroskedstisitas, dan untuk variabel tingkat ketergantungan keuangan daerah yaitu 0,376 diatas 0.05 hal ini menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas pada variabel tersebut. Model penelitian yang dihasilkan dari pengujian analisis regresi berganda adalah sebagai berikut;

$$AD = 187,022-081(UD)-268(O)A-328(TK)+e$$

Dari hasil uji simultan, diperoleh nilai F sebesar 8,220 dengan tingkat signifikansi 0,000 nilai tersebut terbukti lebih kecil dari α (0,05) oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran daerah, opini audit dan tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap audit delay. Nilai koefisien determinasi (*adjusted R Square*) adalah sebesar 0,050 atau 5%. Hal ini berarti bahwa variasi variabel ukuran daerah, opini audit dan tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah mampu menjelaskan variabel audit delay sebesar 5% dan sisanya 95% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini

Berdasarkan hasil uji t pada table 2, nilai signifikansi untuk variabel ukuran daerah adalah sebesar 0,218 dan lebih besar dari 0,05 sehingga **H1 DITOLAK**. Hasil ini dapat diartikan bahwa secara parsial variabel ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap audit delay. Nilai signifikansi dari variabel opini audit adalah sebesar 0,018 dan lebih kecil dari 0,05 sehingga **H2 DITERIMA**. Hasil ini dapat dartikan bahwa secara parsial variabel opini audit berpengaruh terhadap audit delay. Tingkat ketergantungan

keuangan daerah memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05 sehingga **H3 DITERIMA**. Hasil ini dapat diartikan bahwa secara parsial variabel tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh terhadap audit delay.

Tabel 2. Hasil Uji T (Uji Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	187,022	8,937		20,92	,000
Ukuran Daerah	-,081	,065	-,060	-1,23	,218
Opini Audit	-,268	,113	-,116	-2,36	,018
Tingkat Ketergantungan	-,328	,071	-,227	-4,61	,000

Sumber: Data Diolah 2018

Pembahasan

Pengaruh ukuran daerah terhadap audit delay

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis H1 yang menyatakan ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap audit delay **DITOLAK**. Ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap audit delay dikarenakan semakin sedikitnya jumlah entitas akuntansi tidak selalu berakibat pada semakin cepatnya waktu penyampaian laporan keuangan. Jumlah entitas akuntansi yang terlalu sedikit akan mengakibatkan bertambahnya beban pada setiap entitas sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi kurang efektif. Menurut Ruroh & Rahmawati, (2016) besarnya suatu entitas maka akan semakin besar pula cakupan audit. Hal ini menurut Annisa D (2018), Munief dan Suranta (2015) akan mengakibatkan proses pengauditan semakin lama Oleh karena itu besar kecilnya suatu daerah dapat dikatakan tidak mempengaruhi lamanya penyampaian laporan keuangan dan juga lamanya audit delay.

Pengaruh opini audit terhadap audit delay

Hasil ini menunjukkan bahwa H2 yang menyatakan opini audit berpengaruh terhadap audit delay **DITERIMA**. Hal ini dikarenakan semakin baik opini yang diperoleh pemerintah daerah menandakan bahwa suatu pemerintah daerah tersebut memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik akan menyusun laporan keuangannya dengan tepat waktu sehingga dapat meminimalkan audit delay (Annisa D, 2018). Selain itu menurut Aryaningsih dan Budiarta (2014) pemerintah daerah yang memperoleh opini audit selain WTP akan menyebabkan terjadinya audit delay yang panjang hal ini karena diperlukannya pencarian bukti-bukti dan temuan-temuan audit lebih lanjut oleh auditor. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Hardini dan Sukirman (2015), Kartiko, Sigit Wahyu, et al., (2015) dan Aryaningsih dan Budiarta (2014).

Pengaruh tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap audit delay

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H3 yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh terhadap audit delay **DITERIMA**. Hal ini dikarenakan adanya sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah pusat berupa penundaan pemberian bantuan kepada pemerintah daerah apabila pemerintah daerah terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Sehingga setiap pemerintah daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang relatif tinggi akan berusaha untuk patuh dan menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. Apabila laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan ke BPK dengan tepat waktu maka hal ini akan meminimalkan terjadinya audit delay. Jadi semakin tinggi tingkat ketergantungan keuangan daerah akan semakin singkat audit delay yang dihasilkan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Muladi, 2014; Rahmawati, 2016).

Simpulan

Ukuran Daerah yang diproksikan dengan jumlah entitas akuntansi tidak berpengaruh terhadap audit delay Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2015-2016 karena banyak sedikitnya jumlah entitas akuntansi yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak menjamin semakin cepatnya waktu penyelesaian penyusunan laporan keuangan maupun audit. Opini audit terbukti berpengaruh terhadap audit delay pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2015-2016 dikarenakan semakin baik opini yang diperoleh pemerintah daerah menandakan bahwa suatu pemerintah daerah tersebut memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik akan menyusun laporan keuangannya dengan tepat waktu sehingga dapat meminimalkan audit delay. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap audit delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2015-2016, hal ini dikarenakan adanya sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah pusat berupa penundaan pemberian bantuan kepada pemerintah daerah apabila pemerintah daerah terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Sehingga setiap pemerintah daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang relatif tinggi akan berusaha untuk patuh dan menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. Apabila laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan ke BPK dengan tepat waktu maka hal ini akan meminimalkan terjadinya audit delay.

Referensi

- Annisa, D. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Jenis Opini Auditor, Ukuran KAP dan Audit Tenure Terhadap Audit Delay. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 1(1), 108-121.
- Aryaningsih, N. N. D., & Budiarta, I. K. (2014). Pengaruh Total Aset, Tingkat Solvabilitas, dan Opini Audit pada Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi*, 747-760.

- Belkaoui, Ahmed Riahi. (2008). "Accounting Theory" Firth Editions, Singapura: Cengage Learning Asia Fasific Ltd
- Cohen, S., & Leventis, S. (2013, March). Effects of municipal, auditing and political factors on audit delay. In *Accounting Forum* (Vol. 37, No. 1, pp. 40-53). Taylor & Francis.
- Dyer, J.d and A.J. McGough. "The Timeliness of The Australian Annual Report". *Journal of Accounting Research*. Autumn, 1975 pp204-219, 1975.
- Dwyer, P. D., & Wilson, E. R. (1989). An empirical investigation of factors affecting the timeliness of reporting by municipalities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 8(1), 29-55.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of management review*, 14(1), 57-74.
- Fachrurozi, L. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Hardini, Z. G., & Sukirman, S. (2016). Analisis Determinan Audit Delay Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–8.
<https://doi.org/10.15294/aaj.v5i1.9749>
- International Public Sector Accounting Standards Boards. (2010). "Conceptual Framework For General Purpose Financial Reporting By Public Sector Entities". The International Federation Of Accountants (IFAC)
- Kartiko, Sigit Wahyu et al. (2015). "Pengaruh opini audit, kualitas auditor, dan sistem informasi akuntansi terhadap keterlambatan penerbitan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah". Artikel di presentasikan di Simposium Nasional Akuntansi 18, di Universitas Sumatera Utara Medan.
- Lestari, K. A. N. M., & Saitri, P. W. (2017). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Kualitas Auditor Dan Audit Tenure Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 23(1), 1–11.
- McLelland, A. J., & Giroux, G. (2000). An empirical analysis of auditor report timing by large municipalities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 19(3), 263-281.
- Payne, J. L., & Jensen, K. L. (2002). An examination of municipal audit delay. *Journal of Accounting and Public Policy*, 21(1), 1-29.
- Mardiasmo., (2009,) Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI
- Muladi, Aris. (2014). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia". Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Mulyadi. (2002). "Auditing" Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Munief, Itsniawan Abdul dan Suranta Sri. (2016). "Audit Report Lag Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia" SNEMA-2015. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Priptika, P. Y. H., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh audit tenure, pergantian auditor dan financial distress pada audit delay pada perusahaan consumer goods. *E-Jurnal Akuntansi*, 2052-2081.

- Rachmawi, S., Rini, R., & Fitri, Y. (2016). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Akuntabilitas*, 9(1), 143–160. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3589>
- Rahmawati, Zidni. (2016). “Audit Delay Dan faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014)” Naskah Publikasi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ruroh, F. M., & Rahmawati, D. (2016). Pengaruh Pergantian Manajemen, Kesulitan Keuangan, Ukuran Kap, dan Audit Delay terhadap Auditor Switching Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun. Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 5(2), 68-80.
- Siregar, B. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Audit Delay Laporan Keuangan. *Jrak*, 11(2), 89–106.
- Subekti, Imam dan N.W. Widiyanti. (2004). “Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Audit Delay di Indonesia”. Dalam Simposium Nasional Akuntansi VII
- Sugiyono, P. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tiono, Ivena dan Yulius Jogi C. (2013). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag di Bursa Efek Indonesia”. Dalam *Business Accounting Review*. Vol 1 No 3. Surabaya: Universitas Kristen Petra.